

Tugas Kebijakan Publik dan Aplikasi

Nama : Lisa Aryani, S.A.B.

NPM : 2326061009



MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

STRATEGI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA: Literature Review

Masalah kemiskinan masih menjadi isu yang harus disikapi secara serius, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Berbagai strategi dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan untuk mengatasi kerentanan dan kesengsaraan tapi perlu adanya strategi untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat miskin yang nantinya dapat digunakan untuk bertahan hidup dan menjadikan Masyarakat miskin menjadi mandiri saat keluar dari garis kemiskinan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dapat digunakan untuk menurunkan angka kemiskinan di tiap daerah di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan metode literatur review. Penelusuran artikel penelitian menggunakan sumber pencarian online melalui google scholar. Jurnal dan artikel yang diperoleh kemudian diseleksi Kembali berdasarkan publikasi 2019 hingga 2022 yang diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, untuk pembahasan menyesuaikan dengan materi yang akan dibahas. Hasil dari penelitian ini yaitu strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Indonesia ada 3 dan tidak dapat terfokus pada satu strategi saja. Dengan strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diberikan saling berdampingan dan tak terpisah memungkinkan penurunan angka kemiskinan yang lebih signifikan, serta lebih efektif menekan angka kemiskinan untuk terus turun.

Kata kunci: Kemiskinan, strategi kebijakan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan.

BAB I

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah kondisi di mana individu, keluarga, atau kelompok masyarakat memiliki sumber daya ekonomi yang sangat terbatas atau tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar ini meliputi makanan, air bersih, perumahan yang layak, pendidikan, perawatan kesehatan, pakaian, dan akses ke layanan dasar lainnya yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak.

Ditinjau dari segi ekonomi mengenai permasalahan kemiskinan, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2019) diharapkan masyarakat dapat memutus belenggu keterpurukan ekonomi lalu mengalihkan warga miskin dengan beban stigma dari masyarakat menjadi sumber daya yang secara positif mendorong dan terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan proses pembangunan ekonomi negara (Wilman San Marino & Gun Gun Gunawan, 2020). Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia tentunya harus melakukan upaya mengentaskan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan adalah tujuan SDGs urutan pertama dimana hal tersebut merupakan komitmen bersama dari pemerintah Indonesia dengan beberapa negara anggota PBB untuk menjamin bahwa pada tahun 2030 seluruh masyarakat dapat menikmati kemakmuran dan perdamaian. Pencapaian SDGs tidak bisa jika hanya dilakukan melalui upaya pemerintah saja namun membutuhkan tindakan dan kontribusi nyata dari berbagai lapisan di masyarakat. (Hani Putri Febriyanti et al., 2022)

Menurut Sari (2016), upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu dan merata di setiap wilayah. Beberapa capaian pembangunan yang berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan antara lain adalah: alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, dan upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan dan dilaksanakan secara terpadu dan merata di setiap wilayah. Beberapa capaian pembangunan yang berkontribusi besar dalam penurunan kemiskinan antara lain adalah: alokasi anggaran kesehatan, pendidikan, dan perlindungan social (Wisnutama et al., 2023). Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah terjadinya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Irza Firajullah Zatriandika (2021) mengatakan Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka, menurut (Wisnutama et al., 2023). Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat (2020) strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia dibagi menjadi 3, yakni perlindungan sosial, peningkatan kualitas pelayanan di semua bidang, Pengembangan program yang berkelanjutan. Penentuan strategi dalam penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

Banyak model kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Bank Dunia menyebutkan setidaknya sepuluh langkah sudah dilakukan untuk menaklukan kemiskinan, peningkatan fasilitas jalan dan listrik di pedesaan, perbaikan tingkat kesehatan dan sanitasi lebih baik, penghapusan larangan impor beras, pembatasan pajak dan retribusi daerah yang merugikan pengusaha lokal dan orang miskin, pemberian dan pembangunan tanah bagi orang miskin, membangun lembaga-

lembaga keuangan mikro yang memberi manfaat pada penduduk miskin, perbaikan atas kualitas pendidikan mengurangi tingkat kematian ibu pada saat bersalin, menyediakan lebih banyak dana bagi daerah-daerah miskin, merancang perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran (World Bank, 2010).

Jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan 2022 disampaikan pada grafik di bawah ini.



Sumber: Berita Resmi Statistik, 2022

Berdasarkan grafik data di atas, jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin Indonesia memiliki data yang fluktuatif, namun menurun selama jangka waktu 11 tahun, dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2022 sebesar 26,16 juta orang dengan angka kemiskinan sebesar 9,54%. Pencapaian jumlah dan persentase penduduk miskin yang ada ini juga tidak lepas dari usaha pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 11 tahun tersebut.

Program Penanggulangan Kemiskinan disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: 1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; 2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; dan 4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Kemudian pada tahun 2021 untuk kemiskinan ekstrem saja pemerintah berupaya untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas di 7 (tujuh) provinsi. Untuk tahun 2022, pemerintah memperluas cakupannya dengan menanggulangi kemiskinan ekstrem di 212 kabupaten/kota di 25 provinsi. Program

penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2022 juga dilakukan pemerintah dengan fokus pada perluasan pemberdayaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dukungan bagi penurunan kemiskinan ekstrem dilakukan pemerintah dengan diterbitkannya Inpres No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui Inpres ini diharapkan penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat diwujudkan melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah. Inpres ini telah menetapkan bahwa pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui 3 (tiga) strategi kebijakan, yaitu (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat; (2) Peningkatan pendapatan masyarakat; dan (3) Penurunan Jumlah kantong-kantong kemiskinan. (Studi & Daerah, 2019)

Pemerintah menyadari pentingnya pengentasan kemiskinan bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka pemerintah menempatkan pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama. Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) 2005-2025 dan sejalan dengan Kesepakatan Global untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030.

Kemiskinan sebagai masalah sosial menurut Suharto (2014), mempunyai dampak dan sebab yang multidimensi artinya masalah kemiskinan tidak hanya terselesaikan dari sudut pandang ekonomi saja akan tetapi juga tidak bisa diselesaikan secara sosial oleh sebab itu diperlukan penyelesaian yang bersifat holistic. Program-program penanganan masalah kemiskinan sudah banyak digelontorkan oleh pemerintah akan tetapi hasil yang diharapkan tidak bisa mencabut kemiskinan dari akarnya karena program yang diberikan oleh pemerintah hanya bersifat sementara dan dirancang hanya bersifat pemberian bantuan dalam istilah sebut *by product*. Kebijakan-kebijakan penanganan kemiskinan dirancang hanya didasarkan pada konsep kemiskinan dengan pendekatan defisit yang artinya konsep kemiskinan hanya melihat si miskin sebagai korban pasif dan objek penelitian bukan sebagai manusia yang memiliki sesuatu yang dapat digunakannya baik dalam mengidentifikasi kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan mereka sendiri (Wulandari & Rosviantika, 2018).

Beberapa program penanganan kemiskinan misalnya program PKH, Raskin dan BLT program tersebut tidak berhasil menurunkan angka kemiskinan karena sampai saat ini masyarakat miskin masih ada bahkan kemiskinan malah bertambah karena program-program tersebut sangat rentan adanya guncangan kenaikan harga, inflasi ataupun kenaikan dolar atas mata uang rupiah sebab program-program penanganan masalah kemiskinan tidak dirancang untuk merespon atau mencabut akar permasalahan kemiskinan melainkan hanya untuk mengurangi kerentanan dan kesengsaraan. Program-program tersebut hanya mampu merespon gejala atau symptom dan bukan penyebab utama atau akar masalah kemiskinan (Wulandari & Rosviantika, 2018).

Munculnya *Anti Poverty Program* (program anti kemiskinan) pada prinsipnya bukanlah merupakan *redesign* dari Gerdu-Taskin, tetapi adalah revitalisasi dari salah satu aspek tridaya dalam Gerdutaskin yaitu pemberdayaan usaha. *Anti Poverty Program* merupakan gagasan untuk percepatan Gerdu-Taskin dengan sasaran penduduk miskin pada satu kawasan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan disertai pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan. (Bastian, 2009).

Anti Poverty Program merupakan gagasan untuk mempercepat Gerdu-Taskin dengan sasaran penduduk miskin pada satu kawasan yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan disertai pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan. Tujuan umum *Anti Poverty Program* (APP) adalah mengentaskan penduduk miskin dari kehidupan di bawah garis kemiskinan, melalui

pemberdayaan usaha kelompok Masyarakat miskin dengan pola kemitraan yang berbasis cluster. Sedangkan tujuan khususnya adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan pembangunan secara transparan, demokratis dan bertanggung jawab; b. Mengembangkan kemampuan dan peluang usaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi kelompok masyarakat miskin; c. Mengembangkan kelompok masyarakat miskin yang berpotensi melalui usaha produktif yang berbasis cluster dan dapat menjual produknya ke mitra usaha; d. Menyediakan sarana dan prasarana produksi yang mendukung pertumbuhan ekonomi kelompok masyarakat miskin yang berpotensi.(Bastian, 2009)

Adapun sasaran lokasi strategi penanggulangan kemiskinan ini adalah kelompok masyarakat miskin yang tidak hanya berada pada desil 1—3 tetapi bisa pada masyarakat yang berada di atas desil 3 dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, maupun kantong-kantong kemiskinan pada kelompok masyarakat miskin. Sedangkan sasaran strategi kebijakan adalah masyarakat miskin yang tidak hanya melihat dari kekurangan Masyarakat tapi juga dari kekuatan/kemampuan Masyarakat dalam strategi dan upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memiliki keberlanjutan (*sustainable*) dimasa datang, dan memiliki keterkaitan antar sektor usaha maupun antar wilayah.

1. Tujuan

Dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan di Indonesia hingga tingkat daerahnya, maka perlu dilakukan pengkajian yang mendalam untuk mengetahui upaya yang perlu dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang ada di daerah kabupaten/kota terutama strategi kebijakan yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Daerah harus menentukan upaya apa yang sebaiknya di lakukan dalam menurunkan angka kemiskinan daerah baik dari kebijakan maupun program penanggulangan kemiskinan yang akan dilakukan. Berdasarkan hal tersebut maka penting untuk diketahui bagaimana Kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan di daerah dilakukan. Penelitian ini diambil untuk dilakukan analisis melalui *literature review*.

2. Metode

Metode yang digunakan pada strategi dalam mencari jurnal yang digunakan dalam *literature review*, pertanyaan yang digunakan untuk melakukan *review* jurnal yang disesuaikan dengan PICOT (*Population*: Masyarakat miskin, *Intervention*: *community based*, *Comparison*: strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan, *Outcome*: penurunan jumlah penduduk miskin dan penurunan persentase penduduk miskin. *Type of desgin*: *Randomized Control Trial and Non Randomized Control Trial*). Langkah kedua, mengidentifikasi dengan strategi pencarian database publikasi yang relevan, yaitu *Google Scholar*, batasan mengambil jurnal dan hal lainnya. Jurnal yang digunakan dalam *literature review* didapatkan melalui database penyedia jurnal melalui *google scholar*. Penulis membuka website www.scholar.google.com. Peneliti menuliskan kata kunci sesuai *Subject Heading* yaitu “kemiskinan”, “strategi kebijakan kemiskinan”, dan “penanggulangan kemiskinan” dan dipilih *full text*. Muncul 491.000 temuan, kemudian dipersempit dengan yang jurnal dan ditemukan 222.000 temuan selanjutnya diurutkan dari yang terbaru.

BAB II

B. Formulasi Kebijakan

1. Definisi Kemiskinan

Dalam kamus Oxford, kemiskinan yang dalam bahasa Inggris dipakai kata *poverty* memiliki arti, *the state of existing in amounts that are too small; lack, the state of being inferior*. Menurut Sen (1981) kemiskinan adalah suatu keadaan kekurangan (*a matter of deprivation*). Keadaan kekurangan dari dimensi ekonomi merupakan yang utama. Menurut Usman (1994), kemiskinan adalah keadaan yang umum dipakai untuk menggambarkan serba kekurangan. Esmara (1986), kemiskinan diartikan sebagai kesenjangan pendapatan dibanding dengan kebutuhan minimum suatu rumah tangga. Di negara-negara berkembang, definisi kemiskinan lebih merujuk kepada definisi dikemukakan oleh AR Sen.

Menurut Bank Dunia (2000), *poverty is pronounced deprivation in wellbeing*. Kemiskinan adalah ungkapan kekurangan dalam kesejahteraan. Dalam literatur kajian Islam, kata miskin berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata, s-k-n. Dari kata ini diturunkan berbagai kata antara lain; sakana berarti diam, hening dan damai (*to become still, tranquil, peaceful*), tenang, istirahat dan reses (*to calm down, repose, rest*), tempat tinggal, rumah (*residence, home*).

Kemiskinan bisa bersifat relatif atau absolut. Kemiskinan Relatif yaitu merujuk pada kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki pendapatan atau aset yang lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar masyarakat di sekitarnya. Ini berkaitan dengan perbandingan sosial dan ekonomi. Sedangkan Kemiskinan absolut merujuk pada kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak memiliki sumber daya yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, tanpa memandang tingkat pendapatan atau kekayaan masyarakat di sekitarnya. Ini lebih terkait dengan ukuran mutlak kemampuan untuk bertahan hidup. (Wilman San Marino & Gun Gun Gunawan, 2020)

Bappenas (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Bappenas menggunakan beberapa pendekatan untuk menguraikan kemiskinan. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi

orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. (Saragih, 2015)

Permasalahan kemiskinan merupakan persoalan yang hingga saat ini masih terjadi di seluruh bangsa di dunia, khususnya di Negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Kemiskinan bermula dari ketidakmampuan sebagian orang untuk mengatur kehidupannya sampai pada taraf yang dapat dianggap manusiawi. Dalam definisi kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan seseorang yang mengacu pada keadaan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan ketidakmampuan dalam hal standar kehidupan yang layak, pekerjaan, pendidikan kesehatan, serta pendapatan yang tinggi. (Studi & Daerah, 2019)

Kemiskinan juga merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu keseimbangan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan seberapa besar peningkatan kesejahteraan masyarakat selalu dipertanyakan bila ingin mengetahui keberhasilan pembangunan.

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, kemiskinan memiliki 4 bentuk. Menurut Suryawati (2004) Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah: 1) Kemiskinan Absolut Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin. 2) Kemiskinan Relatif Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal. 3) Kemiskinan Kultural Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen. Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain. 4) Kemiskinan Struktural Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terka dang memiliki unsur diskriminatif. (Jacobus et al., 2019)

2. Penyebab Kemiskinan

Ciri-ciri kemiskinan yang hingga saat ini masih dipakai untuk menentukan kondisi miskin adalah: 1. Tidak memiliki faktor produksi sendiri seperti tanah, modal, peralatan kerja, dan ketrampilan yang memadai. 2. Tingkat pendidikan yang relatif rendah 3. Bekerja dalam lingkup kecil dan modal kecil atau disebut juga bekerja

dilingkungan sektor informal sehingga mereka ini terkadang disebut juga setengah menganggur 4. Berada di kawasan pedesaan atau di kawasan yang jauh dari pusat-pusat pertumbuhan regional atau berada pada kawasan tertentu di perkotaan (slum area). 5. Memiliki kesempatan yang relatif rendah dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok yang mencukupi termasuk dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan standar kesejahteraan pada umumnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ciri-ciri kemiskinan di atas tidak memiliki sifat mutlak (absolut) untuk dijadikan kebenaran universal terutama dalam menerangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ataupun terbentuknya kemiskinan. Sifat-sifat kemiskinan di atas hanya merupakan temuan lapangan yang paling banyak diidentifikasi atau diukur. (Jacobus et al., 2019)

Kemiskinan dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk yang Tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar. Sehingga, dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi. Maka akan mengakibatkan angka kemiskinan semakin meningkat.

2. Masyarakat Pengangguran Meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas. Sehingga, angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat.

3. Pendidikan yang Rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah, cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga, masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah.

4. Terjadi Bencana Alam. Bencana alam dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

5. Distribusi Pendapatan yang Tidak Merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. (Aris, 2021)

Dilihat dari beberapa sumber penelitian yang telah dilakukan bahwa ada banyak penyebab terjadinya kemiskinan, baik itu dari internal maupun eksternal. Serta dari beberapa hal tidak terduga atau dampak dari beberapa kejadian seperti bencana alam, dan insiden-insiden tertentu yang terjadi pada tiap individu sebagai penyebab terjadinya kemiskinan. Penyebab terjadinya kemiskinan di berbagai tingkatan daerah ini, menandakan bahwa kemiskinan tidak hanya timbul dari awal karena Masyarakat tersebut berada pada lapisan Masyarakat di bawah garis kemiskinan saja, tetapi juga diakibatkan beberapa faktor lain yang mendapat pada Masyarakat diluar garis

kemiskinan sehingga menurunkan status Masyarakat yang sebelumnya berada di atas garis kemiskinan menjadi berada di bawah garis kemiskinan.

3. Program Penanggulangan Kemiskinan

Terdapat pula program pengentasan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sebagai Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem dan dilaksanakan melalui tiga strategi utama, yaitu: (i) penurunan beban pengeluaran masyarakat; (ii) peningkatan pendapatan masyarakat; serta (iii) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

a. Penurunan beban pengeluaran Masyarakat

Strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial dan jaminan sosial, yaitu:

- 1) Bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako
- 2) Bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Sosial Presiden, *Top Up* bansos reguler.
- 3) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
- 4) Bantuan dan rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus seperti lanjut usia, anak, dan penyandang disabilitas.

b. Peningkatan pendapatan Masyarakat

strategi peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- 1) Peningkatan akses pekerjaan, melalui program Padat karya, bantuan individu/kelompok, serta penyediaan sarana dan prasarana.
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, melalui program vokasi dan pelatihan.
- 3) Peningkatan akses terhadap aset produktif, akses pinjaman modal, dan akses penggunaan lahan.
- 4) Pendampingan dan penguatan kewirausahaan, melalui peningkatan akses pembiayaan dan pasar serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan.
- 5) Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha ultra mikro dan mikro.

c. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan

Strategi ini adalah sinergi kebijakan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui:

- 1) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak.
- 2) Peningkatan konektivitas antar wilayah, seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.(Aris, 2021).

Penyebab kemiskinan secara eksternal dikemukakan oleh Daron et al.,(2006) yang berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh kondisi geografis dan institusional. Kondisi geografis dapat ditemui pada suatu negara dengan iklim yang ekstrem dan berpengaruh pada produktivitas pertanian atau adanya beban penyakit pada warga negaranya. Geografis juga dapat berupa pengembangan masyarakat terutama pada bidang pertanian, serta geografis dapat berarti beban penyakit atau burden disease

(Sachs, 2000). Menurut Vinayak et al., (2006) kondisi institusional pada pengaruh institusi suatu negara seperti adanya kepastian hukum maupun investasi dalam menggerakkan perekonomian negara. Kondisi institusional memandang bahwa perekonomian menjadi penyebab suatu negara menjadi miskin. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah utama dari perekonomian.(Rasdi, 2019).

Menurut pendapat Syahyuti (2006), Upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya mempunyai dua paradigma utama. Pertama paradigma neo liberal dan paradigma demokrasi ekonomi. Paradigma neoliberal mempunyai fokus pembahasan pada individu dan pasar bebas dalam memahami kemiskinan. Permasalahan mendasar dari kemiskinan dalam pandangan ini adalah pada persoalan individu yang bersangkutan. Syarat agar kemiskinan berkurang/hilang dengan memberikan keleluasaan bagi pasar untuk berkembang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam permasalahan kemiskinan Satterthwaite (1997) (dalam Rasdi, 2019). Hal ini mengakibatkan bentukbentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Namun memang pendekatan income poverty ini lebih mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

Berbeda dengan pandangan neo liberal, paradigma demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan merupakan persoalan individual, Cheyene, O'Brien, dan Belgrave (dalam Suharto, 2006) "Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat tersumbatnya akses masyarakat terhadap berbagai sumber kemasyarakatan". Pandangan ini tidak mengindahkan pandangan neo liberal, dengan berpendapat bahwa kapitalisme perlu ada dengan dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih bermanfaat.. Paradigma tersebut memandang bahwa kesetaraan dalam memperoleh kamandirian dan kebebasan menjadi prasyarat penting. (Rasdi, 2019)

Terdapat pula beberapa konsep penting dalam kemiskinan yaitu: 1. Ketidaksetaraan ekonomi atau bisa juga disebut sebagai ketimpangan/kesenjangan ekonomi secara singkat merupakan distribusi pendapatan dan kesempatan yang tidak merata antara berbagai kelompok dalam masyarakat (IZA World of Labour, 2021). 2. Teori meritokrasi adalah teori sosial yang dicetuskan pertama kali oleh M. Young pada tahun 1958 yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem sosial yang menempatkan imbalan, kedudukan dan jabatan berdasarkan kemampuan atau kecakapan dan bukan berdasarkan faktor-faktor askriptif seperti kelas sosial, gender, kesukuan ataupun kekayaan seseorang (Kumorotomo, 2006). Hal tersebut menyebabkan sebagian besar masyarakat menganggap sistem sosial meritokrasi merupakan satu - satunya solusi atas masalah kemiskinan dan kurangnya efektivitas kinerja birokrasi pemerintah maupun swasta.(Luthfiah, 2021)

HASIL

1) Penekanan masalah yang diangkat

Pada penelitian (Wilman San Marino & Gun Gun Gunawan, 2020) dan (Hani Putri Febriyanti et al., 2022) yang diangkat sebagai poin penting dalam penelitiannya adalah layanan lembaga keuangan mikro dengan melihat analisa hubungannya terhadap

pengentasan kemiskinan dan menjadikan variable tersebut sebagai pilihan strategi kebijakan pengentasan kemiskinan sebagai pilihan untuk mengentaskan kemiskinan, serta bagaimana pemerintah dapat memilih strategi kebijakan dalam pengentasan kemiskinan salah satunya yaitu Peningkatan pendapatan Masyarakat. Akan tetapi penelitian (Wilman San Marino & Gun Gun Gunawan, 2020) mengidentifikasi tidak hanya pada layanan Lembaga keuangan mikro saja tetapi juga pada aspek gendernya yaitu pemberdayaan Perempuan yang juga memiliki pengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Kemudian penelitian berikutnya yang dilakukan oleh (Wulandari & Rosviantika, 2018) yang menekankan penelitian pada alternative pemecahan masalah pengentasan kemiskinan melalui salah satu pendekatan yang ada. Pendekatan yang lebih mendekatkan pada kekuatan atau kemampuan Masyarakat dalam salah satu strategi penanggulangan kemiskinan yaitu peningkatan pemberdayaan Masyarakat melalui kewirausahaan social.

Penelitian (Saragih, 2015), menekankan pada alternatif solusi kebijakan program penanggulangan kemiskinan dari begitu banyaknya program kebijakan yang telah dilakukan namun dirasa belum mampu mengurangi angka kemiskinan secara signifikan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan (Wisnutama et al., 2023), yang juga menekankan pada analisis strategi kebijakan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dapat digunakan dan memiliki pengaruh yang lebih signifikan dalam penanggulangan kemiskinan. Sedangkan berbeda dengan hasil pada penelitian (Belasari et al., 2022), peneliti ingin memberikan penekanan bahwa inovasi program perbaikan infrastruktur dapat digunakan dalam penanggulangan kemiskinan dan berpengaruh meskipun bukan termasuk pada strategi peningkatan pendapatan. Program tanpa kumuh masuk dalam strategi kebijakan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan sesuai pada Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

PEMBAHASAN

Analisis terhadap persamaan dan perbedaan dari setiap penelitian penanggulangan kemiskinan pada setiap daerah di Indonesia beranggapan bahwa strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Indonesia belum mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Strategi kebijakan yang bersifat memandirikan masyarakatnya dengan memberikan bantuan peningkatan pendapatan Masyarakat melalui layanan Lembaga keuangan, pemberdayaan Perempuan, kewirausahaan, peningkatan peluang usaha ekonomi dirasa lebih berpengaruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Sesuai dengan tiga strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan menurut Kepmenko PMK Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Hasil ini memiliki kesamaan pada tiap penelitian yang dilakukan oleh (Wilman San Marino & Gun Gun Gunawan, 2020), (Hani Putri Febriyanti et al., 2022), (Saragih, 2015), (Wulandari & Rosviantika, 2018) dan (Wisnutama et al., 2023).

Hasil pada penelitian di atas berbeda dengan hasil penelitian (Belasari et al., 2022), dimana hasil penelitian menyebutkan bahwa strategi implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh, dimana pemerintah melakukan Pembangunan infrastruktur di daerahnya sebagai bentuk inovasi penanggulangan kemiskinan dan mampu untuk membantu penanggulangan kemiskinan di daerah. Dalam hal ini, Pembangunan infrastruktur termasuk dalam strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada model meminimalkan kantong-kantong kemiskinan, yang sebelumnya pada penelitian lain bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dengan system memberikan begitu

saja bantuan tidak terlalu berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan secara signifikan.

Tabel 1. Tabel Literature Review

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1	Wilman San Marino & Gun Gun Gunawan, (2020)	Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro dan Program Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya Wilman	metode penelitian kuantitatif. Pengujian model menggunakan simple mediation analysis by Hayes	terdapat pengaruh yang signifikan antara variable layanan lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan perempuan terhadap pengentasan kemiskinan, serta variable pemberdayaan perempuan memediasi pengaruh layanan lembaga keuangan mikro terhadap program pengentasan kemiskinan. Implikasi
2	Hani Putri Febriyanti et al., (2022)	Socialpreneur Sebagai Strategi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro: Literature Review	Metode penelitian ini menggunakan metode literature review.	Kegiatan socialpreneur dapat menjadi strategi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan melalui layanan lembaga keuangan mikro. Dengan layanan yang mudah dan berkualitas socialpreneur dapat meningkatkan pendapatannya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat.
3	Juli Panglima Saragih, (2015)	Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta	Penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif-analisis.	Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah pusat dan DIY harus terus berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di daerahnya,

				dengan menciptakan strategi baru seperti, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesempatan usaha bagi kelompok miskin, serta meningkatkan anggaran baik anggaran negara maupun anggaran daerah. Pemerintah
4	Wulandari & Rosviantika, (2018)	Pengentasan Kemiskinan Melalui Kewirausahaan: Tinjauan Teoritis Dalam Pendekatan Strength Prespektif	Metode deskriptif kualitatif. Dilakukan dengan menggunakan metode ekspolorasi literature. Analisis dengan menggunakan analisis taksonomi dilakukan dengan cara mengelompokan domain-domain yang memiliki kesamaan tema dalam satu taksonomi .	Pengentasan kemiskinan melalui kewirausahaan dengan pendekatan strength pada intinya melihat orang miskin bukan dari kelemahan yang mereka miliki akan tetapi dari kekutaan yang mereka miliki.
5	Wisnutama et al., (2023).	Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022	Metode analisis deskriptif dan analisis SWOT digunakan untuk menganalisa strategi penanggulangan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Madiun. Hasil	(1) Menilai perkembangan indikator utama angka kemiskinan ektrem di Kabupaten Madiun dari tahun ke tahun semakin efektif, hal ini menunjukkan secara persentase penduduk miskin ekstrem kecil, tapi secara jumlah pasti besar. (2) Hasil identifikasi potensi masyarakat dalam penanggulangan

				kemiskinan ekstrem menunjukkan faktor kekuatan dan peluang yang dimiliki masih lebih besar dibandingkan dengan kelemahan dan ancaman. Kondisi
6	Belasari et al., (2022)	Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Sebagai Inovasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020	Metode yang digunakan adalah metode Kualitatif deskriptif sumber data primernya adalah wawancara dengan 11 informan. Informan	Strategi implementasi kebijakan program kota tanpa kumuh, dimana pemerintah melakukan Pembangunan infrastruktur di daerahnya sebagai bentuk inovasi penanggulangan kemiskinan dan mampu untuk membantu penanggulangan kemiskinan di daerah. Pembangunan infrastruktur termasuk dalam strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan pada model meminimalkan kantong-kantong kemiskinan

SIMPULAN

Dari 6 penelitian yang dipaparkan didapatkan 1 penelitian menggunakan strategi kebijakan meminimalkan kantong-kantong kemiskinan dengan melakukan Pembangunan infrastruktur berupa program kota tanpa kumuh, sedangkan 5 penelitian memiliki hasil sama yaitu bahwa strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan/pemecahan masalah kemiskinan tidak hanya berfokus pada strategi menurunkan beban pengeluaran atau meminimalkan kantong-kantong kemiskinan yaitu strategi yang sifatnya melihat dari kelemahan Masyarakat saja. Karena strategi itu dianggap belum cukup mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. Strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan seperti beras untuk rakyat miskin (Raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, juga dipandang membantu kelompok miskin, walaupun hanya bersifat jangka pendek. Strategi tersebut tidak dianggap mampu membuat Masyarakat miskin menjadi mandiri, tetapi justru membuat Masyarakat memiliki mental ketergantungan terhadap program bantuan dari pemerintah.

Strategi kebijakan peningkatan pendapatan Masyarakat seperti melalui *socialpreneur*, kewirausahaan, pemberdayaan, pembukaan lapangan pekerjaan, kesempatan usaha dan meningkatkan anggaran untuk program kemiskinan, dianggap lebih efektif karena melihat Masyarakat miskin bukan dari kelemahan mereka, melainkan dari kekuatan dan kemampuan mereka untuk dapat berkembang dan hidup lebih mandiri.

Pada daerah Kabupaten/kota di Indonesia telah mulai banyak kebijakan program bantuan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan model peningkatan pendapatan Masyarakat ini melalui pembinaan serta usaha-usaha ekonomi dan kewirausahaan. Model kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menggunakan model proses. Yaitu model kebijakan yang dilakukan melalui kelompok yang memiliki kebijakan public dan hasilnya merupakan suatu proses kebijakan yang berisi: Identifikasi/pengenalan Masalah, Perumusan Agenda, Formulasi Kebijakan, Adopsi Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Evaluasi Kebijakan. Meskipun pada kenyataannya model proses ini jika dilihat dari pemerintah daerah kabupaten/kota, maka yang terjadi langsung pada implementasi kebijakan. Namun proses awal kebijakan dilakukan oleh para pemimpin di pusat. Sehingga daerah menerima kebijakan public langsung pada tahap implementasi dan melanjutkan pada evaluasi.

SARAN

Dari hasil *Literature review* merekomendasikan perlunya dibuat ketentuan tentang strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan mewajibkan pemberian bantuan disandingkan dengan strategi kebijakan lain, agar penurunan kemiskinan dapat dilakukan lebih efektif dan tidak hanya berada pada lingkup untuk mengurangi kerentanann dan kesengsaraan. Strategi kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan sebagai dasar menurunkan beban pengeluaran ataupun meminimalkan kantong-kantong kemiskinan. Tetapi perlu dibarengi dengan pemberian bantuan dengan strategi peningkatan pendapatan. Jika strategi kebijakan penanggulangan kemiskinan menurunkan beban pengeluaran tidak dibarengin dengan peningkatan pendapatan maka memungkinkan adanya hambatan karena program menurunkan beban pengeluaran sangat rentan adanya guncangan kenaikan harga, inflasi ataupun kenaikan dolar atas mata uang

rupiah, sebab program-program tersebut tidak dirancang untuk merespon atau mencabut akar permasalahan kemiskinan melainkan hanya untuk mengurangi kerentanan dan kelemahan/kesengsaraan. Sedangkan jika dibarengi dengan strategi program peningkatan pendapatan Masyarakat, maka Masyarakat miskin akan menjadi lebih mandiri, karena tidak hanya menunggu bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah saja, tapi Masyarakat bisa lepas dari kemiskinan tanpa bergantung dari bantuan pemerintah dari program bantuan seperti pelatihan kewirausahaan, usaha umkm, pemberdayaan Masyarakat dan bentuk bantuan yang lebih melihat Masyarakat dari kemampuan untuk dapat keluar dari garis kemiskinan.

Harapannya saat bantuan yang diberikan ke Masyarakat miskin diberhentikan dalam artian Masyarakat miskin yang telah mendapatkan bantuan keluar dari status miskin, maka mereka dapat bertahan dan tidak lagi masuk status miskin dengan kebijakan program bantuan peningkatan pendapatan Masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris. (2021). *Faktor Penyebab Kemiskinan dan Dampaknya*. Gramedia Blog.
<https://www.gramedia.com/literasi/penyebab-kemiskinan/>
- Bastian, D. (2009). Pengaruh Program Anti Kemiskinan. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 3, 121–134.
- Belasari, B., Rahman, B., & Ranto, R. (2022). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai Inovasi dalam Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat di Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020. *Jurnal Studi Inovasi*, 2(2), 1–16. <https://doi.org/10.52000/jsi.v2i2.85>
- Hani Putri Febriyanti, Triayu Nur Afifah, Nurul Aini, & Marina Ery Setiyawati. (2022). Socialpreneur Sebagai Strategi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro: Literature Review. *Akuntansi*, 1(4), 261–275.
<https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.129>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P. ., & Walewangko, E. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(7), 86–103.
<https://doi.org/10.35794/jpekd.19900.19.7.2018>
- Luthfiah, M. R. E. dan H. (2021). *GAMAPI VIRAL (Review Jurnal)*.
- Rasdi, D. (2019). *EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN : SEBUAH TINJAUAN LITERATUR*
EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE POVERTY REDUCTION : A LITERATURE STUDIES Teguh Kurniawan *Abstrak Kemiskinan merupakan permasa-*. 5(2), 97–112.
- Saragih, J. P. (2015). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Government Policy to Reduce Poverty in the Special Region of Yogyakarta). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 45–59.
- Studi, K., & Daerah, K. (2019). *UG JURNAL VOL.17 Edisi 04 April 2023*. 13–24.
- Wilman San Marino, & Gun Gun Gunawan. (2020). *Upaya Pengentasan Kemiskinan Melalui Layanan Lembaga Keuangan Mikro*. 4(7), 121–132.
- Wisnutama, A., Pramono, J., & Haryanto, A. T. (2023). Analisis Strategis Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Madiun Tahun 2022. *Ji@P*, 12(2).
<https://doi.org/10.33061/jp.v12i2.9002>
- Wulandari, K., & Rosviantika, E. (2018). Pengentasan Kemiskinan Melalui Kewirausahaan: Tinjauan Teoritis Dalam Pendekatan Strength Prespektif. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3*, 579–584.
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/download/9218/6172>